



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRFAN NUGRAHA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PERATURAN PERUNDANGAN IV
3. NHK : 116937

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	753.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 601.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	104.500.000
1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
2. MOTOR, HONDA (SCOOPY) F1CO2N28LO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	139.569.956
F. HARTA LAINNYA	Rp.	70.000.000
Sub Total	Rp.	1.067.069.956
III. HUTANG	Rp.	416.437.238
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	650.632.718

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.